

DINAMIKA HUBUNGAN DWITUNGGA SOEKARNO HATTA DALAM REVOLUSI INDONESIA 1945-1956

Galang Patria Dwipantara
Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Surabaya
gdwipantara@gmail.com

Nasution
Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Surabaya

ABSTRAK

Soekarno-Hatta merupakan dua tokoh besar Indonesia yang sangat berjasa kepada bangsa Indonesia sehingga tidak bisa dilupakan begitu saja. Hubungan Soekarno Hatta telah menempatkan keduanya menjadi tokoh Dwitunggal bangsa Indonesia. Namun dibalik itu terdapat dinamika antara Soekarno Hatta. Hubungan yang harmonis masa pendudukan Jepang tak bertahan lama. Masa setelah kemerdekaan pertentangan Soekarno Hatta mencapai klimaks. Pertentangan Soekarno Hatta begitu pelik setelah peristiwa 17 oktober dan Pemilu 1955 sehingga menyebabkan pecahnya Dwitunggal.

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode sejarah, yang terdiri dari heuristik, kritik sumber, interpretasi dan historiografi. Dinamika hubungan Dwitunggal Soekarno Hatta sangat mempengaruhi sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Pertentangan Soekarno Hatta telah terjadi sejak masa pergerakan sampai demokrasi parlementer. Perbedaan ini didasarkan pada perbedaan artifisial Revolusi.

Sistem Demokrasi parlementer ditentang Soekarno sebagai sistem demokrasi liberal ala barat. Keretakan Soekarno Hatta tak dapat dihindarkan dan semakin meruncing. Soekarno mendapat dukungan kuat dari militer, PKI dan PNI. Hatta menyadari Soekarno memiliki kekuatan untuk membubarkan demokrasi parlementer. Akhirnya Hatta mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden yang merupakan akumulasi dari pertentangan dengan Soekarno. Berakhirlah pasangan Dwitunggal Soekarno Hatta

Kata Kunci: Soekarno Hatta, Dwitunggal, Revolusi

ABSTRACT

Soekarno-Hatta was the two great figures of Indonesia that very meritorious for Indonesian nation so that can not be forgotten just like that. Soekarno Hatta relationship has put both of them into a figure Dwitunggal Indonesian nation. However behind that there are dynamics between Soekarno Hatta. Harmonious relationship the Japanese occupation period didn't last long. Period after independence, conflict between Sukarno Hatta reaches a climax. Soekarno Hatta's conflicts so quaint after the event 17 October and 1955 election thus causing Dwitunggal outbreak.

The method used the researcher in this study is the history method comprising heuristic, source criticism, interpretation and historiography. Relationship dynamics Dwitunggal of Soekarno Hatta very affect the journey history of the nation of Indonesia. Soekarno Hatta's conflicts has occurred since the movement period until parliamentary democracy. This distinction is based on artificial distinction of revolution.

System of parliamentary democracy opposed Soekarno as system of liberal democracy western. Soekarno Hatta's rift can not be avoided and more pointed. Sukarno had strong support from the military, PKI and PNI. Hatta aware Soekarno has the power to dissolve the parliamentary democracy. Finally Hatta resigned as Vice President of which is the accumulation of a conflict with Sukarno. Ended the duumvirate pair Soekarno Hatta.

Key Word: Soekarno-Hatta, Dwitunggal, Revolution

PENDAHULUAN

Soekarno Hatta merupakan bapak proklamator Indonesia “*The Founding Father*”. Sejarah bangsa Indonesia tak lepas dari perjalanan pola pemikiran Soekarno Hatta. Namun terlepas dari semua itu, hubungan Soekarno Hatta tidak selamanya harmonis. Dinamika Soekarno Hatta selalu merubah setiap perjalanan sejarah bangsa Indonesia.

Pemikiran-pemikiran dari kedua tokoh ini yang telah mengarahkan Indonesia kedepan pintu gerbang kemerdekaan. Namun juga ada perbedaan saat mengisi kemerdekaan Indonesia. Perbedaan keduanya juga dipengaruhi dari Budaya, pendidikan dan lingkungan saat kedua tokoh ini dilahirkan.

Soekarno yang lahir di Surabaya pada tanggal 6 Juni 1901 dan Moh Hatta lahir di Bukittinggi 12 Agustus 1902, mempunyai karakter yang berbeda. Kondisi pendidikan juga mempengaruhi watak, sikap dan arah strategi perjuangan. Soekarno yang memperoleh pendidikan di dalam negeri cenderung radikal terhadap setiap tekanan penjajahan. Selama perjalanan membentuk jiwa kepemimpinan nasionalisme dan keorganisasian. Soekarno mengikuti pergerakan pemuda Tri Koro Darmo. Hatta mengembangkan kepemimpinannya dengan mengikuti Jong Sumatranen Bond (JSB). Lebih dalam lagi kita lihat latar belakang Soekarno yang merupakan orang Jawa sedangkan Hatta adalah orang Minang, dilihat dari pribadinya sangat jelas terbaca akan adanya potensi yang besar untuk terjadinya konflik atau pertentangan¹.

Pada tanggal 9 Juli 1942, Soekarno, yang telah dikirim ke Jakarta oleh pihak Jepang, bertemu dengan Hatta dan Sjahrir. Ketiganya mengadakan rapat di rumah Hatta dan sepakat bahwa Soekarno Hatta bekerja sama dengan Jepang, dan Sjahrir bersama Persatuan Mahasiswa di Jakarta menyusun perlawanan bawah tanah.² Demikian pula dengan Soekarno, kesediaannya untuk bekerjasama dengan pihak Jepang didasarkan atas prinsip yang sama dengan Hatta³.

Setelah Jepang menyerah pada pihak sekutu. Pada tanggal 17 Agustus 1945 Bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan dari segala bentuk penjajahan. Terbentuklah simbol Dwitunggal Soekarno Hatta atas representatif dari rakyat Indonesia.

Setelah kemerdekaan tercapai Soekarno Hatta mulai menata pemerintahan sebagai dasar adanya suatu negara yang berdaulat. PPKI diubah menjadi KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat) yang merupakan lembaga pembantu Presiden sesuai dengan Aturan Peralihan Pasal IV UUD 1945, Presiden Soekarno

menjalankan kekuasaan MPR, DPR, dan DPA sebelum lembaga-lembaga tersebut terbentuk⁴.

Polemik Soekarno Hatta muncul dimasa kemerdekaan ketika Hatta mengeluarkan maklumat yang mempengaruhi kedudukan Soekarno sebagai presiden. Dekrit ini terkenal sebagai “Maklumat X”⁵. Maklumat Wakil Presiden No X menetapkan bahwa kabinet presidensial yang diatur oleh UUD 1945 diubah menjadi kabinet parlementer. Kabinet bertanggung jawab kepada KNIP yang berfungsi sebagai DPR.⁶

Soekarno ingin menciptakan rasa persatuan Indonesia yang tercerai berai akibat politik adu domba Belanda. Itulah yang ditandaskan kembali di dalam pidatonya 23 Agustus untuk membenarkan adanya satu partai Tunggal⁷. Namun beberapa keputusan yang dibuat oleh PPKI ternyata tidak bisa berjalan sempurna terutama ide pembuatan partai tunggal yaitu Partai Nasional Indonesia (PNI), hal ini disebabkan karena kurangnya dukungan dari elit politik nasional pada waktu itu.⁸

Maklumat 3 November 1945 atas prakarsa Hatta dan Sjahrir dikeluarkan sebagai cerminan pemerintahan yang demokratis. Maklumat 3 November memberikan seluas-luasnya kepada rakyat untuk membentuk partai politik. Pemerintah ingin merubah persepsi tentang pemerintahan yang otoriter.

Perubahan ketentuan aturan pemerintahan oleh Hatta dan Sjahrir menimbulkan polemik di kemudian hari. Kedua tokoh besar Bangsa Indonesia Soekarno Hatta memiliki prinsip yang berbeda sehingga pertentangan diantara keduanya semakin meruncing tanpa adanya titik temu.

Pertentangan ini telah ada semenjak mereka aktif dalam organisasi pergerakan pemuda menentang kolonialisme Belanda hingga akhirnya Bung Hatta mengundurkan diri dari pemerintahan pada tanggal 1 Desember 1956, pengunduran ini beralasan untuk mengakhiri pertentangan antar keduanya.⁹

Soekarno-Hatta memiliki perbedaan dalam memandang Demokrasi di Indonesia. Demokrasi yang ingin di cita-citakan Soekarno yaitu demokrasi atas gotong royong. Demokrasi dengan rasa persatuan dari semua kalangan demi kemajuan kaum marhaen. Hatta lebih menekankan pada demokrasi parlementer yang dapat menyaring aspirasi dari partai-partai. Demokrasi yang saling mengawal antar lembaga untuk menghindari pemerintahan absolute.

⁴ Bangir Manan. 2003. *Teori dan Politik Konstitusi*. Yogyakarta: FH UII Press. Halaman: 192.

⁵ Herbert Feith. 2001. *Sukarno Dan Militer Dalam Demokrasi Terpimpin*. Jakarta: Sinar Harapan. Hal 398

⁶ Maswadi Rauf. 2000. *Konsensus Politik*. Jakarta. Hal 115

⁷ Herbert Feith. *Op.Cit*. Sukarno Dan Militer Dalam Demokrasi Terpimpin. Hal 399

⁸ George Mc. Turnan Kahin. 1997. *Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia*. Surakarta: UNS Press. Halaman: 148.

⁹ *Ibid.*, Halaman: 116.

¹ Maswadi Rauf. 2000. *Konsensus Politik*. Jakarta. Halaman: 115-117.

² M.C. Ricklefs. 2009. *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*. Jakarta: Serambi. Halaman: 429.

³ Marwati Djoened dan Nugroho Notosusanto. 1984. *Sejarah Nasional Indonesia VI*. Jakarta: Balai Pustaka. Halaman: 15.

Penelitian ini akan difokuskan pada peristiwa pergerakan Soekarno Hatta, kemerdekaan, peristiwa 17 oktober 1952 dan pemilu 1955 yang mempengaruhi hubungan Soekarno Hatta karena adanya polarisasi politik partai yang dimiliki Soekarno Hatta. Momentum itu dijadikan suatu kompromi bagi Soekarno untuk membubarkan demokrasi parlementer.

METODE

Metode penulisan sejarah ini adalah prosedur analitis yang ditempuh sejarawan untuk menganalisis kesaksian yang ada, yaitu faktor sejarah sebagai bukti yang dapat dipercaya mengenai masa lampau manusia¹⁰. Dalam metode sejarah ada empat tahapan yang harus dilakukan yaitu heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi.

Heuristik, yaitu proses penelusuran sumber, baik primer maupun sekunder. Sumber yang dapat dikumpulkan dapat diklasifikasikan menjadi tiga bagian. Sumber utama dalam penelitian ini adalah Buku "Demokrasi Kita" Karya Hatta tahun terbit 1960, "Dibawah Bendera Revolusi" tulisan-tulisan karya Soekarno cetakan tahun 2005. Sumber kedua yang digunakan penulis yaitu arsip dan Koran Mata Warta untuk mendukung penulisan penelitian ini. Sumber ketiga mengumpulkan sumber-sumber buku mengenai masa hidup Soekarno Hatta, Deliar Noer "Mohammad Hatta: Biografi politik" tahun 1990, Bernhard Dahn "Sukarno dan Perjuangan Kemerdekaan" tahun 1987, Deliar Noer "Partai Islam di Pentas Nasional" Tahun 1987. Serta buku-buku yang relevan.

Kritik, proses melakukan pengujian terhadap kredibilitas dan otentisitas sumber. Kritik sumber dibagi menjadi dua. Pertama kritik ekstern yang dilakukan untuk mengetahui otentisitas sumber. Kedua, kritik intern untuk mengetahui kredibilitas atau kebenaran isi sumber tersebut. Ada perbedaan analisis setiap pemberitaan atau penulisan melalui media maupun buku-buku yang terkait. Mata Warta dalam pemberitaannya memaparkan kondisi pemunduran Hatta secara normatif. Dalam penyajiannya pemberitaan Soekarno-Hatta tidak menampilkan secara kritis, terkesan menutupi perbedaan pendapat kedua tokoh tersebut. Penulisan Rosihan Anwar dalam Kompas cenderung bersikap subyektif menyikapi perjuangan Soekarno-Hatta masa pergerakan. Setelah diamati dari berbagai sumber media, penulisan dalam media cenderung melakukan penulisan secara diplomatis dengan tidak menghendaki adanya perpecahan diantara tokoh tersebut.

Interpretasi merupakan tahap ketiga. Pada tahap ini fakta-fakta sejarah ditafsirkan dan dianalisis serta dihubungkan dalam rangkaian kronologis, sehingga didapatkan alur yang sistematis. Setelah melalui kritik sumber fakta sejarah yang dihasilkan kemudian dihubungkan dengan fakta yang lain sehingga mendukung penulisan ini.

Historiografi ialah tahap terakhir. Dalam tahapan ini fakta yang terkumpul kemudian disintesis dan dituangkan dalam bentuk tulisan yang deskriptif-analitis dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar sesuai kaidah tata bahasa agar komunikatif dan mudah dipahami pembaca.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peristiwa 17 Oktober 1952

Setelah masa Republik Indonesia Serikat (RIS) jumlah personil kekuatan pertahanan negara semakin besar. Hatta dan Nasution mengeluarkan kebijakan rasionalisasi kemiliteran membentuk TNI yang profesional. Rasionalisasi militer mendapat tantangan terutama dari kalangan tentara bekas PETA dan bekas tentara KNIL. Dua kubu tentara ini memicu kelompok-kelompok yang saling berseberangan di struktural AD.

Kebijakan rasionalisasi disetujui oleh kementerian pertahanan Sultan Hamengkubuwono IX. Timbullah pertentangan di dalam tubuh Angkatan Darat. Di tubuh TNI AD terdapat beberapa kelompok pendukung akibat adanya kebijakan rasionalisasi TNI. Hatta mendukung KSAD Kolonel A.H Nasution untuk melaksanakan rasionalisasi. Kubu Kepala Staf Angkatan Perang Kolonel T.B Simatupang dan Kolonel Supeno menentang Nasution atas kebijakan rasionalisasi. Ia mendapatkan dukungan dari presiden Soekarno¹¹. Perlawanan Kolonel Bambang Supeno didasari sikap dukungan presiden Soekarno, parlemen yang saling berkonfrontasi dengan TNI-AD tentang permasalahan pimpinan Angkatan Perang Indonesia. Kekuatan politik Soekarno yang lemah masih membutuhkan kekuatan politik dari TNI-AD untuk mendukung konsepsinya.

Hatta yang taat konstitusi tidak membawa dirinya menuju permasalahan AD dan tidak mencampuri permasalahan AD di parlementer. Keputusan Hatta didasari atas pertimbangan bahwa tentara tidak memasuki arena berpolitik serta menjaga wibawa pemerintah. sikap ini tetap dipegang teguh oleh Hatta dengan mengkritik Nasution yang ingin memasuki politik praktis.

Soekarno sudah memantapkan rencananya untuk membubarkan demokrasi parlemen. Cita-citanya tentang konsep revolusi Demokrasi Terpimpin ingin dijadikan suatu aturan dan diterapkan di Indonesia. Semakin terasa keinginan presiden untuk secara nyata berperan dalam pimpinan negara umumnya dan terhadap APRI khususnya¹². Kekuatan poros baru terasa akan jelas menghadapi demokrasi parlementer.

Tuntutan TNI-AD agar penyelesaian internal AD diselesaikan secara aturan internal diabaikan oleh parlemen. TNI-AD merasa ada intervensi pada internal AD dengan adanya mosi, keberatan itu didasarkan pada kewenangan parlemen mengatur pimpinan Angkatan Perang Republik Indonesia (APRI).

¹¹ Deliar Noer. 1987. *Partai islam di pentas nasional*. Jakarta. Grafitipers. Hal 275

¹² Nasution. 1984. *Memenuhi Panggilan Tugas Jilid 3 : Masa pancaroba pertama*. Jakarta. Gunung Agung. Hal 150

¹⁰ Louis Gottschalk. 1986. *Mengerti Sejarah* (Jakarta: Universitas Indonesia. hlm. 18-19

Penyelesaian internal AD yang tidak kunjung selesai di parlemen. Pada tanggal 17 Oktober 1952 terjadi demonstrasi masyarakat yang dimobilisasi militer yaitu TNI-AD menuntut pembubaran parlemen. Tuntutan pembubaran disampaikan kepada Presiden Soekarno di depan istana merdeka. Aksi demonstrasi militer menuai pro dan kontra di kalangan militer. Soekarno menerima aksi demonstrasi di depan gedung negara. Kedudukan Soekarno masih lemah¹³. Soekarno dengan tegas menolak tuntutan TNI-AD. Penolakan Soekarno dengan pembubaran parlemen terhalang karena keberadaan Hatta yang membentengi perjalanan demokrasi parlemen. Pemilu masih menjadi pilihan utama untuk mengubah demokrasi parlemen.

Soekarno mengetahui Hatta masih memiliki kekuatan dari kalangan partai dan militer. Dukungan Hatta masih kuat dari kalangan partai Masyumi, PSI dan perwira militer dari golongan Kolonel Lubis. Seandainya AD sengketa dengan Bung Hatta di waktu itu, TNI akan dapat terpecah belah¹⁴. Soekarno menunggu waktu terbentuknya kekuatan militer dengan partai pendukungnya.

Militer menjadi kekuatan utama Soekarno dalam merencanakan pembubaran demokrasi parlemen. Soekarno menggunakan militer selain partai sebagai kekuatan perimbangan baru di parlemen untuk mengimbangi kekuatan Hatta yang didukung oleh partai dominan seperti Masyumi. Sejak peristiwa 17 oktober 1952 Soekarno mulai dekat dengan Kolonel Nasution. Nasution juga memiliki kepentingan untuk menjadikan militer masuk dalam politik parlemen.

B. Pemilu 1955

Maklumat 3 November yang berisi tentang pemerintah yang menyukai timbulnya partai-partai politik karena membuka pintu demokrasi bagi bangsa Indonesia untuk melaksanakan pemilihan umum. Hatta mengawal langkah perjuangan bangsa Indonesia menuju sistem yang demokratis.

Namun Presiden, TNI, partai-partai mengutuk masa itu sebagaimana 'Liberal' seakan-akan mewujudkan kebebasan yang berlebih-lebihan¹⁵. Dalam pidato pengangkatan kepresidenannya Soekarno menginginkan suatu konsep partai tunggal dengan adanya satu kepemimpinan agar terjaga stabilitas politik pemerintahan. Soekarno mengutuk kebiasaan demokrasi liberal Barat, dan dalam kata-kata yang mencerminkan tindakan-tindakan politiknya kemudian (pada pertengahan tahun 1950-an), ia menyatakan perlunya bagi Indonesia membentuk demokrasi terpimpin.¹⁶

Sejak zaman pergerakan Soekarno menentang konsep pemilihan umum yang tidak sesuai dengan prinsip sosionasionalisme dan sosiodemokrasi. Demokrasi yang diinginkan Soekarno tidak hanya demokrasi politik tetapi juga demokrasi ekonomi. Maklumat 3 November dianggap sebagai konsep liberalisme. Soekarno memperingatkan isi maklumat 3 November akan membawa pemerintahan Indonesia pada sistem liberal yang jauh dari azas kesatuan. Sistem liberal sangat ditentang Soekarno karena membawa nilai-nilai kolonialisme dan imperialisme. Soekarno yang masa itu masih lemah dalam politik akhirnya menerima kebijakan itu dengan lapang dada.

Dikeluarkannya Maklumat 3 November merupakan kemenangan politik Hatta di dalam pemerintahan dengan membentuk demokrasi di kalangan masyarakat Indonesia. Hatta berharap dari timbulnya partai-partai dapat menjadi wadah aspirasi masyarakat menciptakan tatanan demokrasi. Partai dapat menjadi tulang punggung rakyat dalam menentukan arah perjuangan bangsa.

Setelah penyerahan kedaulatan Indonesia oleh Belanda melalui perjanjian KMB, akhirnya Indonesia menganut sistem demokrasi liberal berdasarkan Undang-undang Dasar Sementara 1950. Kekuasaan Presiden dan Wakil Presiden hanya berupa simbol-simbol persatuan Bangsa. Soekarno secara politik tidak memiliki peranan dalam pemerintahan. Kedudukan tertinggi pemerintahan Indonesia dipegang Perdana Menteri. Hatta perlahan-lahan kembali merencanakan Undang-undang Pemilu yang sebelumnya tertunda.

Sesuai dengan UUDS 1950 kedudukan Presiden Soekarno sebagai kepala Negara tidak dapat mengambil tindakan sendiri. Satu-satunya kewenangan presiden adalah menunjuk seorang atau beberapa orang menjadi formatur kabinet¹⁷. Kewenangan Soekarno yang dibatasi UUDS 1950 memunculkan polemik dengan Hatta dalam aturan-aturan pemerintahan.

Hatta dengan sikap keteguhannya tetap ingin pemilu terlaksana sebagai wujud dari demokrasi. Pertentangan-pertentangan yang dihadapi Hatta tidak menyurutkan tekadnya. Instabilitas politik pemerintahan dapat dilalui dengan baik oleh Hatta untuk terus mengawal pelaksanaan pemilu sesuai maklumat 3 November.

Di masa demokrasi Liberal 1950 penyelenggaraan pemilu terkendala parlemen yang saling menjatuhkan antar partai-partai yang dominan dalam pemerintahan. PNI dan Masyumi tidak pernah harmonis menjalankan Kabinet. Sistem partai yang seharusnya menjadi aspirasi rakyat menjadi kekuatan demi kepentingan golongan.

Arena politik didominasi oleh partai-partai yang terus jatuh-menjatuhkan kabinet dalam sistem multipartai, maka dengan itu telah tampil kekuatan baru,

¹³ Bernhard Dahm. 1987. *Sukarno dan Perjuangan Kemerdekaan*. Jakarta. LP3ES. Hal 404

¹⁴ Nasution. 1984. *Memenuhi Panggilan Tugas Jilid 4 : Masa pancaroba kedua*. Jakarta: hal 7

¹⁵ Nasution. 1984. *Memenuhi Panggilan Tugas Jilid 3 : Masa pancaroba pertama*. Jakarta Hal 250

¹⁶ John D. Legge. 1985. *Sukarno-sebuah biografi politik*. Jakarta: Sinar Harapan. Hal 279

¹⁷ Alam Wawan Tunggal. 2003. *Demi Bangsaku Pertentangan Sukarno VS Hatta*. Jakarta : Gramedia. Hal 254

yakni AD dan Bung Karno¹⁸. Partai-partai di parlemen memiliki golongan-golongan dan tokoh sendiri untuk memperkuat pengaruhnya di kabinet. PKI nyata melakukan siasat yang jitu, yang membuatnya lebih dapat mengendalikan perkembangan, yakni melalui dorongan-dorongan terhadap posisi Bung Karno dan PNI¹⁹. PNI tetap pendukung utama segala kebijakan Soekarno. Partai-partai lain lebih dekat kepada Bung Hatta, kecuali NU yang lebih dekat ke Bung Karno.²⁰

Kabinet Wilopo mengeluarkan UU pemilu juga tidak lepas dari pengawasan Hatta. Kabinet Wilopo meski PNI tetapi tidak disukai Soekarno²¹. Pada tahun 1953 menghasilkan UU No. 7/1953 tentang pemilu untuk menetapkan konstitusi Republik Indonesia pengganti UUDS 1950. Inisiatif Hatta untuk melaksanakan pemilu dapat berjalan dengan baik sesuai dengan janjinya, pelaksanaan pemilu merupakan akar dari regenerasi kepemimpinan bangsa.

Kabinet silih berganti, kekhawatiran Soekarno terbukti akibat adanya sistem perlemeter yang dapat mengganggu stabilitas pemerintahan. Hatta melihat ini merupakan pendewasaan demokrasi tetapi Hatta kecewa kepada partai yang hanya mementingkan tujuan golongannya. Ketika delapan bulan kemudian Wilopo jatuh, maka kekuatan-kekuatan pro Hatta menderita kekalahan besar.²²

Pengalaman dan kemampuan Hatta dalam melakukan konsolidasi antar partai mengantarkan Hatta untuk menunjuk Burhanuddin Harahap membentuk kabinet yang sedang mengalami krisis kewibawaan. Hatta memberikan tugas kepada Burhanuddin Harahap sebagai program kabinet untuk memulihkan wibawa pemerintah dan menyelenggarakan pemilihan umum.²³

Pemilihan DPR dan konstituante dari beberapa partai dapat menjaring aspirasi rakyat dan segera menetapkan Undang-Undang Dasar baru menggantikan UUDS 1950. Pemilihan Umum 1955 diikuti oleh 34 partai politik yang terdiri dari 4 partai politik besar, seperti PNI, Masyumi, NU, PKI dan partai-partai politik yang kecil.²⁴

Soekarno melalui pidatonya pada tanggal 17 Agustus 1955 menentang jumlah partai yang semakin tumbuh berkembang. Keleluasaan membentuk partai mengarah kepada sistem demokrasi liberal ala barat yang sangat ditentang Soekarno. Sikap ini ditegaskan oleh

Soekarno dalam pidatonya, "katakanlah bahwa Republik Indonesia bukan Republik Demokrasi".²⁵

Hatta memaklumi timbulnya partai-partai yang semakin banyak di bangsa Indonesia. Menurut UUDS 1950 bukanlah anggota yang dipilih rakyat melainkan diangkat oleh pemerintah negara bagian lama²⁶. Kesempatan ini memberikan ruang kepada daerah lain untuk terjun dalam politik.

Tanggal 29 September 1955 Pemilu I dilaksanakan secara baik untuk pemilihan DPR. Dilanjutkan dengan pemilihan konstituante pada tanggal 15 Desember 1955. Pemenang pemilu 1955 terdiri dari PNI, Masyumi, NU dan PKI.

Namun di kemudian hari Hatta mengutarakan kekecewaannya terhadap sikap partai di parlemen. Kepentingan golongan sangat di utamakan daripada kepentingan rakyat. Harapan Hatta melaksanakan pemilu untuk menghasilkan pemerintahan yang stabil tidak terwujud. Masyumi, NU dan PNI sukar mencapai persesuaian paham.²⁷

Keberhasilan Hatta melaksanakan pemilu merupakan upaya untuk membentuk pemerintahan yang demokratis. Walaupun pelaksanaan pemilu pertama di Indonesia masih terdapat banyak kekurangan. Namun langkah Hatta memberikan wajah baru di dalam pemerintahan Indonesia. Sementara itu partai-partai serta Bung Karno yang dihadapi selama ini justru tidak memberi suatu alasan untuk berkronfontasi lagi.²⁸

C. Perpecahan Dwitunggal Soekarno Hatta

Hatta merupakan sosok negarawan yang taat administratif dalam menjalankan roda pemerintahan. Keinginannya mundur dari kedudukan Wakil presiden salah satunya didasari atas pengertian Hatta akan kelanjutan sistem UUDS 1950 tentang masa jabatan presiden dan wakil presiden yang belum tercantum. Hatta sebagai pengagum demokrasi ingin menerapkan sistem demokrasi dengan memperlihatkan sikap pengunduran diri kepada negara.

Soekarno baru saja mulai mencari sekutu di antara partai-partai yang sependapat dengannya, bahwa revolusi Indonesia masih belum selesai, dan telah memperoleh respon dari PKI yang telah disusun kembali, dari Murba dan PNI²⁹. Soekarno dengan cakap telah menggunakan *balance* antara PKI dan PNI, sambil menumpulkan pertentangan di antara mereka dan

¹⁸ Nasution, 1984. *Memenuhi panggilan Tugas Jilid 4: Masa pancaroba kedua*. Jakarta. PT Gunung Agung. Hal 8

¹⁹ *Ibid.* Hal 8

²⁰ *Ibid.* hal 14

²¹ Alam Wawan Tunggul. 2003. *Demi Bangsaku Pertentangan Sukarno VS Hatta*. Jakarta : Gramedia.

²² Herbert Feith. 1995. *Soekarno-Militer Dalam Demokrasi Terpimpin*. Jakarta. Pustaka sinar harapan. Hal. 14

²³ Deliar Noer. 1990. *Biograsi Politik Muhammad Hatta*. Jakarta. LP3ES. Hal 454

²⁴ Nasution. *Op.Cit.* Hal.31

²⁵ Roesln Abdul Gani. 1963. *Dari Proklamasi Sampai Gesturi*. Jakarta. Yayasan prapantja. Hal 280

²⁶ Mohammad Hatta. 1960. *Demokrasi Kita*. Jakarta. Pandji masyarakat. Hal 12

²⁷ *Ibid.* Hal 13

²⁸ Nasution. 1984. *Memenuhi panggilan Tugas Jilid 4: Masa pancaroba kedua*. Jakarta. PT Gunung Agung. hal 7

²⁹ Bernhard Dham. 1987. *Sukarno dan Perjuangan Kemerdekaan*. Jakarta: LP3ES hal. 404

meminta mereka berlomba menunjukkan kesetiaan kepadanya³⁰.

Soekarno memberikan isyarat bahwa Dwitunggal telah mengalami perpecahan. Keduanya berbeda pandangan dalam menyikapi permasalahan kebangsaan. Soekarno memandang bahwa revolusi belum selesai dan merupakan suatu proses menuju revolusi sosial. Bung Hatta tidak sependapat dengan mengatakan bahwa yang belum selesai adalah usaha menyelenggarakan cita-citanya, selesainya revolusi yaitu pada waktu penyerahan kedaulatan 1949 sehingga perlu dilanjutkan dengan konsolidasi untuk merealisasikan hasil revolusi itu³¹.

Cara-cara Soekarno yang tidak mencerminkan kenegarawan menampilkan Hatta untuk menjaga hubungan Dwitunggal. Hubungan yang tidak harmonis dan prinsip yang berseberangan memecah Dwitunggal. Hatta menyampaikan keinginannya untuk meletakkan jabatannya sebagai Wakil Perdana Menteri. Tetapi Natsir dan Halim membujuknya dan Hatta setuju untuk berkerjasama dengan bung Karno sampai enam bulan lagi.³²

Ungkapan perbedaan prinsip telah dikatakan Hatta saat pertemuan dengan Guntur tahun 1977, Hatta mengatakan: ayahmu terlampau percaya kepada komunis, sebelum merdeka dan setelah merdeka saya sudah beritahukan kepada ayahmu untuk tidak percaya kepada komunis. Bagaimanapun juga komunis itu adalah komunis dan pada satu ketika akan berusaha merebut kekuasaan.³³

Mundurnya Hatta sebagai Wakil Presiden begitu banyak dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan politik. Kekuatan-kekuatan politik juga memperkeruh hubungan Dwitunggal Soekarno-Hatta. Peranan PKI dan PNI menambah gentingnya suasana keretakan Dwitunggal. Soekarno-Hatta pasangan Dwitunggal Proklamator Bangsa Indonesia.

SIMPULAN

Dinamika Hubungan Dwitunggal Soekarno Hatta tidak lepas dari pola pendidikan dan latar belakang budaya. Soekarno lahir di Surabaya yang hidup di dalam tradisi Jawa. Soekarno mengenyam pendidikan Sekolah Rakyat, ELS dan HBS. Semasa mengenyam pendidikan di HBS, Soekarno mulai bersinggungan dengan dunia pergerakan. Soekarno bertempat tinggal di rumah tokoh pergerakan Sarikat Islam HOS Tjokroaminoto. Di usia muda Soekarno terjun ke dalam politik Tri Koro Darmo sehingga membentuk watak politiknya.

Hatta lahir di Bukittinggi di dalam budaya Sumatera. Hatta keturunan bangsawan Islam di Sumatera Barat sehingga Hatta dalam pendidikannya menempuh di sekolah Belanda. Keduanya dilahirkan dan dididik dengan nuansa budaya yang sangat berbeda sehingga wataknya mempengaruhi gaya politiknya. Soekarno berkiprah di Hindia Belanda dan Hatta berkiprah di Belanda. Keduanya berjuang di jalan masing-masing, Soekarno dengan *Study club* dan Hatta dengan Perhimpunan Indonesia.

Walaupun jarak memisahkan keduanya, saling kritik, mengeluarkan gagasan dan info pergerakan merekatkan mereka dalam dunia tulisan. Semasa pergerakan dan kembalinya Hatta ke tanah air, dinamika keduanya mempengaruhi politik pergerakan di Indonesia. Hatta dengan PNI (Pendidikan Nasionalisme Indonesia) dan Soekarno melalui Partindo pergerakan Indonesia semakin dinamis. Soekarno dan Hatta saling kritik tentang arti perjuangan non kooperatif menghadapi Hindia Belanda. Sampai Soekarno Hatta di asingkan ke flores dan Boven Digul.

Masa pendudukan Jepang Soekarno Hatta bersikap kooperatif dengan memanfaatkan sikap kooperatif demi kepentingan kemerdekaan Indonesia. Selama pendudukan Jepang perselisihan Soekarno Hatta dikesampingkan, saling isi mengisi, berkerja sama. Semasa pendudukan tidak ada perselisihan berarti antara Soekarno Hatta. Soekarno Hatta bersepakat berkerjasama, isyarat terbentuknya Dwitunggal. Kerjasama hubungan Dwitunggal telah mengantarkan kemerdekaan Indonesia.

Setelah kemerdekaan Dwitunggal mengalami perselisihan secara ideologis. Soekarno Hatta berselisih paham tentang sistem pemerintahan yang akhirnya mengarah pada sistem presidential. Namun sistem presidential tak berlangsung lama, Hatta mengeluarkan maklumat 3 November tentang kepartaian akhir dari sistem sentralistik Soekarno. Kemudian mengeluarkan maklumat X Wakil presiden pembentukan BP KNIP sehingga sistem presidential diubah menjadi sistem demokrasi parlementer.

Presiden Soekarno hanya menjadi simbol negara yang tidak memiliki kewenangan. Sampai masa demokrasi parlementer Soekarno menghimpun kekuatan yang sepaham dengan konsepnya yaitu Militer, PNI dan PKI. Kekuatan yang begitu besar dari Soekarno yang tak dapat dibendung lagi dari kalangan militer. Secara perlahan-lahan Hatta dan pendukungnya Masyumi, PSI tidak memiliki kekuatan politik.

Kekuatan politik pendukung Soekarno Hatta semakin memperkeruh suasana Dwitunggal. Soekarno Hatta memiliki konsep masing-masing tentang artifisial revolusi. Kekuatan pendukung kedua tokoh ini juga sangat mempengaruhi hubungan Soekarno Hatta.

Akhirnya Hatta mengundurkan diri 1 Desember 1956 setelah pelaksanaan Pemilu. Mundurnya Hatta dimanfaatkan Soekarno untuk melaksanakan cita-citanya tentang Demokrasi Terpimpin.

³⁰ Kapitsa M.SN & Maletin NP. 2009. *Soekarno Biografi Politik*. Bandung: Ultimus hal. 151

³¹ Alam Wawan Tunggul. 2003. *Demi Bangsaku Pertentangan Sukarno VS Hatta*. Jakarta. Gramedia. hal. 275-276

³² Ibid. hal 269

³³ I Wangsa Widjaja. 1990. *Bung Hatta*.

SARAN

Saran yang perlu dijadikan bahan pertimbangan yaitu adanya sikap subyektifitas dalam Hubungan Dwitunggal Soekarno Hatta. Karena Dalam Penelitian ini mengarah pada sisi pergerakan Soekarno Hatta yang memiliki interpretasi berbeda. Penulisan ini diharapkan mampu memberikan wacana baru dinamika hubungan Soekarno Hatta sebagai pasangan Dwitunggal yang telah mengantarkan kemerdekaan Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Alam Wawan Tunggul. 2003. *Demi Bangsa*. Jakarta : Gramedia.

Dahm, Bernhard. 1987. *Sukarno dan Perjuangan Kemerdekaan*. Jakarta: LP3ES

Feith, Herbert. 2001. *Sukarno Dan Militer Dalam Demokrasi Terpimpin*. Jakarta: Sinar Harapan

Gottschalk, Louis.1986. *Mengerti Sejarah* Jakarta: Universitas Indonesia.

Hatta, Moh. 1960. *Demokrasi Kita*. Jakarta :Pandji Masyarakat

Kahin, George Mc. Turnan. 1997. *Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia*. Surakarta: UNS Press

Kapitsa M.SN & Maletin NP. 2009. *Soekarno Biografi Politik*. Bandung: Ultimus

Legge, John. 1985. *Sukarno-sebuah biografi politik*. Jakarta: Sinar Harapan.

Nasution. 1984. *Memenuhi Panggilan Tugas Jilid 3 :Masa pancaroba pertama*. Jakarta: Gunung Agung.

Nasution. 1984. *Memenuhi Panggilan Tugas Jilid 4 : Masa pancaroba kedua*. Jakarta: Gunung Agung.

Noer, Deliar. 1990. *Mohammad Hatta, Biografi Politik*. Jakarta: LP3ES.

Noer, Deliar. 1987. *Partai Islam Di Pentas Nasional 1945-1965*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti

Widjaja, Wangsa. 1990. *Bung Hatta*. Yayasan marinda: Jakarta

Disetujui,
Di Surabaya, 22 Januari 2013
Dosen Pembimbing,

Drs. Nasution, M.Hum., M.Ed., Ph.D.
NIP. 19660802 199212 1 001